



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Telepon (0343) 748383 Faksimile (0343) 748383
Laman perpusarsip.pasuruankab.go.id, Pos-el dinasperpusipkabpas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Laporan Kinerja merupakan laporan yang menjadi kewajiban Pemerintah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Untuk memberikan laporan yang terkait dengan capaian kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan sebagai bahan evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja selama tahun 2025

Demikian LkjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 pada semua pihak yang membantu dan bekerjasama sehingga terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) disampaikan terima kasih, Namun disini lain kami menyadari dari apa yang telah diselesaikan ini masih perlu adanya masukan dan saran sebagai koreksi untuk perbaikan laporan yang akan datang

Pasuruan, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN



TAUFIKHUL GHONY, S.E, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197002111993031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Gambaran Perangkat Daerah	6
1.4 Isu Strategis.....	12
1.5 Dasar Hukum	13
1.6 Sistematika Penyusunan	15
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024 - 2026	17
2.2 Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025 – 2029.....	19
2.3 Perjanjian Kinerja 2025	21
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan 2025	22
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	27
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2.....	333
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah renstra ..	38
3.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional	44
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	499
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025	53
3.1.7 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.....	55
3.2 Realisasi Anggaran	56
3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	56
3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	66
BAB IV PENUTUP.....	72
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu, cerdas, kreatif dan bertanggungjawab serta ikut mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, sedangkan Kearsipan sebagai penyelenggaraan kearsipan mampu mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, tertib arsip, keselamatan, aset, dan perlindungan bahan pertanggungjawaban Pemerintah dan perlindungan hak-hak perdataan masyarakat.

Dengan alasan tersebut, maka Perpustakaan dan Kearsipan harus ada dan dapat menjadi pendukung dan pendorong dalam reformasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dan ikut mewujudkan negara dan pemerintah yang memenuhi karakteristik *Good Governance* yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj)

Penyusunan laporan kinerja (LKj) perangkat daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap perangkat daerah dalam menyusun perjanjian kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Tujuan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah juga

berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sebagai wujud dari pelaksanaan azas akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance*), telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam perencanaan pembangunan daerah Pasuruan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 serta 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan penyajian laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dalam tugas dan fungsi pokok sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literatur, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling serta memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan diharapkan mampu untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya dan minat baca masyarakat.

Sementara dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip In-aktif, statis yang memiliki nilai sejarah dan memberikan pembinaan penataan kearsipan untuk mewujudkan tertib administrasi kearsipan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2024 – 2026 serta Tahun 2025-2029. Adapun maksud dan tujuan adalah:

a. Maksud

Disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025.
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 Gambaran Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan tugas kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bagian Ketujuh Belas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan yang memiliki tugas sesuai Paragraf 2 Pasal 124 (1) yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan serta tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Paragraf 2 Pasal 124 (2) yang terdiri :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bagian Ketujuh Belas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Paragraf 1 Pasal 123 terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- b. Bidang Perpustakaan;
- c. Bidang Kearsipan;
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1) Sekretariat

Tugas : mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program

Fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga,
- g. hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- k. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;

- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Bidang Perpustakaan

Tugas : melaksanakan kebijakan program dan kegiatan di bidang perpustakaan

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;
- b. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
- c. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;

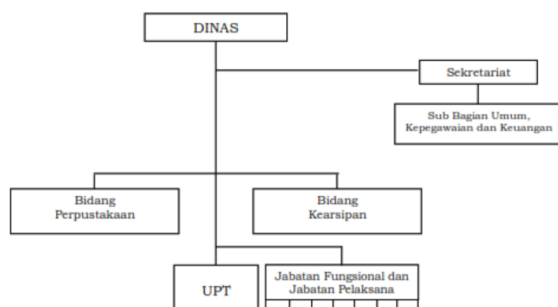
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan (Perpustakaan Umum, Khusus, PAUD, TK, SD, dan SMP) implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepastakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
 - f. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 3) Bidang Kearsipan
- Tugas : menyelenggarakan kebijakan program dan kegiatan di bidang kearsipan.
- Fungsi :
- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kearsipan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan sosialisasi penyelenggaraan kearsipan;

- e. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan;
- f. pelaksanaan perencanaan program pengawasan kearsipan;
- g. melaksanakan audit, penilaian dan monitoring hasil pengawasan kearsipan;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip dinamis dan statis;
- i. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis;
- j. pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;
- k. pelaksanaan pengolahan arsip;
- l. pelaksanaan preservasi arsip;
- m. pelaksanaan layanan informasi arsip;
- n. pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan arsip statis;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PASURUAN



C. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan terdapat 60 orang pegawai yang terdiri 16 orang PNS, 42 orang PPPK dan 2 orang PPPK Paruh Waktu yang dalam pelaksanaan tugasnya terbagi di beberapa tempat yaitu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan Daerah dan di Perpustakaan Umum yang terdapat di 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Purwosari, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Tosari, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Grati, Kecamatan Nguling. Kondisi Sumber Daya Manusia dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025

No.	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Pendidikan					Jumlah
		L	P	S2	S1	D3	SLTA	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PNS :								
	Struktural	2	3	4	1	-	-	-	5
	Fungsional	2	3	2	3	-	-	-	5
	Staf	5	2	-	1	-	5	-	6
2.	PPPK	28	14	-	18	2	22	-	42
3.	PPPK Paruh Waktu	1	1	-		1	1	-	2
	Jumlah	38	22	6	23	3	28		60

Tabel 1.2
Data Pegawai berdasarkan Unit Kerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025

No.	Jenis Kepegawaian	Unit Kerja		
		Bidang Perpustakaan	Bidang Kearsipan	Sekretariat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PNS :			
	Struktural	1	1	3

	Fungsional	4	1	1
	Staf	0	1	4
2.	PPPK	14	15	13
3.	PPPK Paruh Waktu	1	1	0
	Jumlah	20	19	21

Adapun aset yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan meliputi bangunan gedung beserta isinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Data Aset
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

NO	JENIS	NILAI
(1)	(2)	(3)
1.	Tanah	Rp. 45.200.000,00
2.	Bangunan Gedung : - 8 Unit Bangunan Gedung Perpustakaan Umum - 1 Unit Bangunan Gedung Kantor Dinas	Rp. 14.150.542.139
3.	Peralatan dan Mesin : 4 Unit Mobil Perpustakaan Keliling 5 Unit Mobil Operasional 9 Unit Sepeda motor 2 Unit Roda Tiga Mebeler, Komputer dll	Rp. 7.463.619.820
4.	Aset Buku Barang dan Kebudayaan	Rp. 3.759.818.370
5.	Aset Jalan, irigasi dan Jaringan yang meliputi air bawah tanah di PU Rembang serta PDAM PU Rembang	Rp. 19.913.000
6.	Aset-aset Lainnya Non Rusak Berat	Rp. 149.651.180
	Jumlah	Rp. 25.588.744.509

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan yang akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang. Perumusan isu-isu strategis

dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangkah menengah.

Mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka dalam kerangka meningkatnya kegemaran membaca masyarakat serta meningkatnya pengawasan arsip perangkat daerah, maka ada beberapa isu strategis, yaitu:

- 1) Pengolahan data perpustakaan berbasis digital;
- 2) Terwujudnya layanan prima perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya gemar membaca;
- 3) Terwujudnya pengelolaan arsip statis untuk menjamin ketersediaan informasi;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan

1.5 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bagian Ketujuh Belas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 – 2026;
17. Surat Edaran Perpustakaan Nasional RI Nomor B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 Perihal Edaran Penyesuaian Target

IKK Daerah Urusan Perpustakaan Terkait Perubahan Penghitungan IPLM dan TKM.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjabaran antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, dasar hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan rencana strategis perangkat daerah, dan perjanjian kinerja perangkat daerah perubahan/terbaru tahun yang berkenaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun N;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2;
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika sama indikatornya);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dijelaskan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja perangkat daerah setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan alokasi anggaran per sasaran pembangunan.

1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
2. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya.
- 3) Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024 - 2026

Rencana Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dibuat berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 yang memuat tujuan dan sasaran daerah yang merupakan panduan / acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan dan sasaran daerah selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian, pelaksanaan program dan kegiatan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masuk dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026
beserta Indikator Kinerja

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Persentase penduduk miskin	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP

Dari tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat		Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	85	85,50	86
		Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	Indeks	8,60	8,70	8,80
			Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	5,00	5,50	5,70
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip		Nilai Audit Kearsipan	Nilai	68	68,5	69

		Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah secara baku	Persen	14,7	22,05	29,41
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80	80,50	82

Tabel 2.3
Matrik RPD 2024 -2026

NO	RPD				RENSTRA			
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Persentase penduduk miskin	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
								Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku
							Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.2 Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025 – 2029

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2025 - 2029 berdasarkan visi, misi dan program prioritas Bupati Pasuruan yang diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 dimana yang selaras dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD 2025 – 2029

VISI/MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
VISI : "Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan" MISI : "Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif"	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	Meningkatnya SDM yang unggul dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan sejumlah tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025 – 2029

Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatkan SDM yang Unggul dan Berkelanjutan

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Indikator Tujuan : Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Nilai	74,5	75	77	79	80
2	Indikator Tujuan : Nilai Audit Kearsipan / Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	79	80	80,5	81	81,4
3	Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	Indeks	59,55 (12,51)	60,69 (12,75)	62,79 (13,19)	67,29 (14,14)	69,79 (14,66)
4	Indikator Sasaran : Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelola Arsip Secara Baku	Persen	23,53	29,41	35,29	41,18	52,94
5	Indikator Sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81	81,5	82	82,5	83

2.3 Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja untuk menetapkan target yang harus dicapai pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	85,5
	1) Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	12,75
		2) Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,5
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79
	1) Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	1) Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	22,05
	2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut didukung program dengan anggaran sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 2.899.378.650	APBD
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 61.910.000	APBD
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 386.853.500	APBD
4	Program Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 113.07.500	APBD

5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6.874.347.519	APBD
---	--	-------------------	------

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diatas, terdapat 2 (dua) tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yaitu :

- a. Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dengan indikator kinerja Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) target nilai 85 dengan sasaran :
 - Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial yang terdiri 2 indikator kinerja antara lain Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) target indeks 12,75
 - Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) target 12,5%.
- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja Nilai Audit Kearsipan target nilai 79 dengan 2 sasaran, yaitu :
 - Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku target 22,05%
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah target nilai 81.

2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	74,50
		Nilai Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	79,00

	1. Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	60,69
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,50
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79,00
	1. Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	1. Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	22,05
		2. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	23,53
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81,00

Untuk mewujudkan perubahan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan tersebut didukung program dengan perubahan anggaran sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.989.314.900	P-APBD
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 19.010.000	P-APBD
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 345.816.000	P-APBD
4	Program Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 11.990.000	P-APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.849.982.844	P-APBD

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diatas, terdapat 2 (dua) tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yaitu:

- a. Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) target nilai 85 serta Nilai

Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) target nilai 79 dengan sasaran :

- Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial yang juga terdiri 2 (dua) indikator kinerja antara lain Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) target indeks 60,69 serta Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) target 12,5%.

b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja Nilai Audit Kearsipan target nilai 79 dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

- Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku dengan target 22,05% serta Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku dengan target 23,53%.
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target nilai 81.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan selaku pengemban amanah masyarakat urusan perpustakaan dan urusan kearsipan melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Dalam laporan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Renstra 2025 – 2029, maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interpretasi Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3	>75 - <100	Tidak mencapai target (Lebih Dari Cukup)
4	55 – 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
5	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja suatu Perangkat Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai atau mengevaluasi target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja telah tercapai atau belum. Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dokumen komitmen antara pimpinan perangkat daerah dengan kepala daerah dalam mewujudkan target Pembangunan khususnya dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Dalam implementasinya, Perjanjian Kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator kuantitatif, tetapi juga harus menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjadi landasan strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Dinas Perpustakaan responsif terhadap kebutuhan spesifik gender. Hal ini berarti bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki dalam mengakses layanan perpustakaan dan layanan kearsipan.

Dalam pelaksanaan PUG, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan langkah strategis :

1. Integrasi Analisis Gender dalam Perencanaan Program

Setiap program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan dianalisis menggunakan pendekatan Gender Analisis Pathway untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Gender Analysisist Pathway
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Program	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti laki-laki dan perempuan	Akses : OPD dan Desa/ Kelurahan serta masyarakat	pelayanan perpustakaan lebih banyak perempuan	perkembangan teknologi	Meningkatkan ekonomi laki-laki dan perempuan	Kegiatan Workshop Perpustakaan dalam meningkatkan perannya bagi kesejahteraan masyarakat Anggaran : Rp.36.660.000	Peningkatan pengunjung perpustakaan	Output : meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan
		Partisipasi : Perempuan lebih banyak hadir daripada laki-laki	kurang bahan bacaan yang dibutuhkan laki-laki dipelayanan perpustakaan	laki-laki tidak memiliki waktu lebih		Kegiatan Peningkatan Tenaga Perpustakaan Dalam Rangka Mewujudkan Perpustakaan berbasis IT Anggaran : Rp. 6.275.000	Peningkatan kapasitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang sesuai standar	Outcome : terlayannya pembudayaan kegemaran membaca
		Manfaat : bisa dirasakan oleh laki-laki dan perempuan difengah masyarakat						

2. Penganggaran Responsif Gender

Penyusunan anggaran telah memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan laki – laki termasuk kelompok rentan seperti lansia serta penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dalam alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

3. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memastikan pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang ramah gender, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan dan pengelola arsip dalam memberikan pelayanan yang sensitif gender dan non-deskriminatif

4. Penguatan Data Terpilah Gender

Penyediaan dan pemanfaatan data bidang perpustakaan dan bidang kearsipan terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi kinerja, sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

5. Koordinasi dan Kemitraan.

Pelaksanaan PUG dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

Sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja, implementasi PUG turut berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, seperti Tingkat Kegemaran Membaca serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Ke depan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan terus memperkuat kelembagaan PUG melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi internal, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi berbasis gender guna mendukung terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi masyarakat melalui literasi dengan adil, setara, dan inklusif.

3.1.1.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	85,5	60,52	70,78
	Sasaran : Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	12,75	Formulasi 2024: 61,3 Formulasi 2025 : 1,94	Formulasi 2024 : 480,78 Formulasi 2025 : 15,21
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan	Persen	12,5	12,5	100

		Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)				
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79	76,54	96,88
	Sasaran : Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	22,05	32,35	146,71
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81	81,10	100,12

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diatas, terdapat 2 (dua) tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yaitu

a. Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan indikator kinerja Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) target nilai 85,5 dengan realisasi kinerja 60,52 sehingga capaian kinerja 70,78% dengan sasaran Meningkatkan Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial yang terdiri 2 indikator kinerja antara lain :

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) target indeks 12,75 dengan realisasi kinerja untuk formulasi 2024 sebesar 61,3 sehingga capaian kinerja 480,78%. Untuk realisasi kinerja formulasi 2025 sebesar 1,94 sehingga capaian kinerja 15,21%
- Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) target 12,5% dan realisasi kinerja 12,5% sehingga capaian kinerja 100%

b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja Nilai Audit Kearsipan target nilai 79 dengan realisasi kinerja 76,54 sehingga capaian kinerja sebesar 96,88% yang memiliki 2 sasaran, yaitu :

- Meningkatkan Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah

Daerah Secara Baku target 22,05% dengan realisasi kinerja sebesar 32,35% sehingga capaian kinerja 146,71%

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah target nilai 81 dengan realisasi 81,10 sehingga capaian kinerjanya 100,12%

3.1.1.2 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	74,5	60,52	81,23
		Nilai Audit Kearsipan/ Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	79,00	76,54	96,88
	Sasaran : Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	60,69	Formulasi 2024: 61,3 Formulasi 2025 : 1,94	Formulasi 2024 : 101 Formulasi 2025 : 3,19
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,50	12,50	100
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79,00	76,54	96,88
	Sasaran : Meningkatnya	Persentase Pengelolaan	Persen	22,05	32,35	146,71

	Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku				
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	23,53	32,35	137,48
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81,00	81,10	100,12

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diatas, terdapat 2 (dua) tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yaitu:

1. Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) target nilai 85 dengan realisasi kinerja 60,52 sehingga capaian kinerjanya 81,23% serta Nilai Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) target nilai 79 dengan realisasi kinerja 76,54 sehingga capaian kinerjanya 96,88% dengan sasaran :
 - Meningkatkan Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial yang juga terdiri 2 (dua) indikator kinerja antara lain :
 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) target indeks 60,69 dengan realisasi formulasi 2024 61,3 sehingga capaian kinerja mencapai 101%. Untuk realisasi formulasi 2025 sebesar 1,94 sehingga capaian kinerja hanya 3,19%
 - Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) target 12,5% dengan realisasi kinerja 12,5% sehingga capaian kinerja telah 100%
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja Nilai Audit Kearsipan target nilai 79 dan realisasi kinerja 76,54 sehingga capaian kinerja 96,88% dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

- Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku dengan target 22,05% dengan realisasi kinerja 32,35% sehingga capaian kinerja 146,71%
 - Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku dengan target 23,53% dengan realisasi kinerja 32,35% sehingga capaian kinerja 137,48%
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target nilai 81 dengan realisasi 81,10 sehingga capaian kinerja 100,12%

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2

Perbandingan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut :

3.1.2.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun N dengan Tahun N-2
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA		
				2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	62,59	74,33	60,52
	• Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	10,01	12,51	Formulasi 2024: 61,3 Formulasi 2025 : 1,94
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	3,75	10	12,5
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	70,75	78,77	76,54

• Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	-	-	32,35
• Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80,05	80,50	81,10

Dari tabel diatas, berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025, perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023 s/d 2025 dapat disimpulkan:

1.) Tujuan I : Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat.

- Indikator kinerja utama tujuan I adalah Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). pada tahun 2023 Nilai TKM 62,59 dan mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 74,33 namun pada tahun 2025 mengalami penurunan dengan nilai 60,52
- Sasaran strategis dari tujuan I yaitu meningkatkan literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS);
- Indikator kinerja I : Tahun 2023 IPLM Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai 10,01, Tahun 2024 nilai IPLM mengalami kenaikan menjadi 12,51. Untuk tahun 2025 mengalami perubahan formulasi penghitungan nilai IPLM. Untuk formulasi tahun 2024 nilai IPLM sebesar 61,3 sedangkan formulasi tahun 2025 nilai IPLM sebesar 1,94
- Indikator kinerja II : Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tahun 2023 sebesar 3,75. Untuk tahun 2024 TPBIS mengalami kenaikan menjadi 10 dan tahun 2025 mendapat nilai sesuai target yaitu sebesar 12,5

2.) Tujuan II Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip.

- Indikator kinerja dari tujuan ke II ini adalah nilai audit kearsipan yaitu berupa hasil audit eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pada 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun

2023 sampai dengan 2025 nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 70,75 dan tahun 2024 sebesar 78,77 namun pada tahun 2025 nilai ASKE mengalami penurunan dengan nilai sebesar 76,54.

- Pada tujuan II memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu :
 - a. meningkatnya pengawasan kearsipan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku yang baru terealisasi tahun 2025 dengan nilai 32,35
 - b. meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 80,05 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 80,50 dan tahun 2025 sebesar 81,10;

3.1.2.2 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun N dengan Tahun N-2
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA		
				2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	62,59	74,33	60,52
		Nilai Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	70,75	78,77	76,54
	• Meningkatkan Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	10,01	12,51	Formulasi 2024: 61,3 Formulasi 2025 : 1,94
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	3,75	10	12,5

2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	70,75	78,77	76,54
	• Meningkatkan Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	-	-	32,35
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	11,90	14,70	32,35
	• Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80,05	80,50	81,1

Dari tabel diatas, berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023 s/d 2025 dapat disimpulkan:

- 1.) Tujuan I : Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat, pada Perjanjian Kinerja Perubahan tujuan I memiliki 2 indikator kinerja, antara lain :
 - Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). pada tahun 2023 Nilai TKM 62,59 dan mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 74,33 namun pada tahun 2025 mengalami penurunan dengan nilai 60,52
 - Nilai Audit Kearsipan/ Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) yaitu berupa hasil audit eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pada 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2023 sampai dengan 2025 nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 70,75 dan tahun 2024 sebesar 78,77 namun pada tahun 2025 nilai ASKE mengalami penurunan dengan nilai sebesar 76,54.

- Sasaran strategis dari tujuan I yaitu meningkatkan literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - Indikator kinerja I : Tahun 2023 IPLM Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai 10,01, Tahun 2024 nilai IPLM mengalami kenaikan menjadi 12,51. Untuk tahun 2025 mengalami perubahan formulasi penghitungan nilai IPLM. Untuk formulasi tahun 2024 nilai IPLM sebesar 61,3 sedangkan formulasi tahun 2025 nilai IPLM sebesar 1,94
 - Indikator kinerja II : Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tahun 2023 sebesar 3,75. Untuk tahun 2024 TPBIS mengalami kenaikan menjadi 10 dan tahun 2025 mendapat nilai sesuai target yaitu sebesar 12,5

2.) Tujuan II Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip.

- Indikator kinerja dari tujuan ke II ini adalah nilai audit kearsipan yaitu berupa hasil audit eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pada 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2023 sampai dengan 2025 nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 70,75 dan tahun 2024 sebesar 78,77 namun pada tahun 2025 nilai ASKE mengalami penurunan dengan nilai sebesar 76,54.
- Pada tujuan II memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu :
 - meningkatnya pengawasan kearsipan Perangkat Daerah. Pada perjanjian Kinerja Perubahan sasaran ini memiliki 2 indikator, yaitu :
 - Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku yang baru terealisasi tahun 2025 dengan nilai 32,35
 - Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku pada tahun 2023 terealisasi sebesar 11,90 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 14,70 dan tahun 2025 sebesar 32,35

- meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 80,05 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 80,50 dan tahun 2025 sebesar 81,10;

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah renstra

3.1.3.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

a. Renstra 2024 – 2026

Tabel 3.6
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
dengan Renstra 2024 - 2026
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Nilai	85	74,33	85,50	60,52
Meningkatnya literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	8,60	12,51	8,70	61,3
	Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	5,00	10	5,50	12,5
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Nilai Audit kearsipan	Nilai	70,80	78,77	68,5	76,54
Meningkatnya pengawasan kearsipan perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	14,70	14,70	22,05	32,35

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80,50	80,50	81	81,10
---	---	-------	-------	-------	----	-------

Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tabel 3.5 yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024 2026 menjelaskan secara umum telah mencapai dan melebihi target kinerja.

1. Tujuan : Meningkatkan kegemaran membaca dengan indikator TKM pada tahun 2024 terealisasi 74,33 dengan target awal 85. Pada tahun 2025 terealisasi 60,52 dari target 85,5. Sasaran Meningkatnya literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial memiliki 2 indikator :
 - a. IPLM pada tahun 2024 terealisasi 12,51 dengan target 8,60. Pada tahun 2025 terealisasi 61,3 dengan target 8,70
 - b. TPBIS pada tahun 2024 terealisasi 10% dengan target 5%. Pada tahun 2025 terealisasi 12,5% dengan target 5,50%
2. Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dengan indikator Nilai Audit Kearsipan pada tahun 2024 terealisasi 78,77 dengan target 70,80. Pada tahun 2025 terealisasi 76,54 dengan target 68,5. Tujuan ini memiliki 2 sasaran :
 - a. Meningkatnya pengawasan kearsipan perangkat daerah dengan indikator Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku tahun 2024 terealisasi 14,70% dengan target 14,70%. Pada tahun 2025 terealisasi 32,35% dengan target 22,05%
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2024 terealisasi 80,50 dengan target 80,50. Pada tahun 2025 terealisasi 81,10 dengan target 81

b. Renstra 2025 – 2029

Tabel 3.7
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
dengan Renstra 2025 – 2029
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025	
		TARGET	REALISASI
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	74,5	60,52
Meningkatnya literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	60,69	61,3
	Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	n/a	12,5
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Nilai Audit kearsipan	79	76,54
Meningkatnya pengawasan kearsipan perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	23,53	32,35
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81	81,10

Pada renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian target daripada renstra 2024-2026. TKM yang semula 85,5 menjadi 74,5. IPLM yang semula 8,70 menjadi 60,69. TPBIS semula 5,50%, untuk renstra 2025-2029 tidak dijadikan indikator sasaran dikarenakan tidak semua lokus mampu menerapkan pelaksanaan TPBIS tersebut karena beberapa faktor :

- sumber daya IT tidak ada, atau pendiri sekaligus pengelola tidak memiliki waktu untuk membuka SIM
- Koleksi bahan bacaan yang sangat kurang
- Perpustakaan/TBM/Lokus hanya menjadi gudang buku atau tempat membaca semata tapi adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Nilai audit kearsipan yang semula 68,5 menjadi 79. Persentase pengelolaan arsip pemerintah secara baku serta Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku semula 22,05 menjadi 23,53.

3.1.3.2 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

A. Renstra 2024 – 2026

Tabel 3.8
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Renstra 2024 - 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Nilai	85	74,33	85,50	60,52
	Nilai Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	70,80	78,77	68,5	76,54
Meningkatnya literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	8,60	12,51	8,70	61,3
	Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	5,00	10	5,50	12,5
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Nilai Audit kearsipan	Nilai	70,80	78,77	68,5	76,54
Meningkatnya pengawasan kearsipan perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	14,7	14,7	22,05	32,35
	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku	Persen	14,7	14,7	22,05	32,35

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80,50	80,50	81	81,10
---	---	-------	-------	-------	----	-------

1. Tujuan : Meningkatkan kegemaran membaca memiliki 2 indikator, yaitu indikator TKM pada tahun 2024 terealisasi 74,33 dengan target awal 85. Pada tahun 2025 terealisasi 60,52 dari target 85,5. Indikator Nilai Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) pada tahun 2024 terealisasi 78,77 dengan target 70,80. Pada tahun 2025 terealisasi 76,54 dengan target 68,5.
 - Sasaran Meningkatkan literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial memiliki 2 indikator :
 - a. IPLM pada tahun 2024 terealisasi 12,51 dengan target 8,60. Pada tahun 2025 terealisasi 61,3 dengan target 8,70
 - b. TPBIS pada tahun 2024 terealisasi 10% dengan target 5%. Pada tahun 2025 terealisasi 12,5% dengan target 5,50%
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dengan indikator Nilai Audit Kearsipan pada tahun 2024 terealisasi 78,77 dengan target 70,80. Pada tahun 2025 terealisasi 76,54 dengan target 68,5. Tujuan ini memiliki 2 sasaran :
 - a. Meningkatkan pengawasan kearsipan perangkat daerah dengan indikator Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku tahun 2024 terealisasi 14,70% dengan target 14,70%. Pada tahun 2025 terealisasi 32,35% dengan target 22,05%
 - b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2024 terealisasi 80,50 dengan target 80,50. Pada tahun 2025 terealisasi 81,10 dengan target 81

B. Renstra 2025 – 2029

Tabel 3.9
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Renstra 2025-2029
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025	
		TARGET	REALISASI
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	74,5	60,52
Meningkatnya literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	60,69	61,3
	Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	n/a	12,5
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Nilai Audit kearsipan	79	76,54
Meningkatnya pengawasan kearsipan perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	23,53	32,35
	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku	23,53	32,35
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81	81,10

Pada renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian target daripada renstra 2024-2026. TKM yang semula 85,5 menjadi 74,5. IPLM yang semula 8,70 menjadi 60,69. TPBIS semula 5,50%, untuk renstra 2025-2029 tidak dijadikan indikator sasaran dikarenakan tidak semua lokus mampu menerapkan pelaksanaan TPBIS tersebut karena beberapa faktor :

- sumber daya IT tidak ada, atau pendiri sekaligus pengelola tidak memiliki waktu untuk membuka SIM
- Koleksi bahan bacaan yang sangat kurang
- Perpustakaan/TBM/Lokus hanya menjadi gudang buku atau tempat membaca semata tapi adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Nilai audit kearsipan yang semula 68,5 menjadi 79. Persentase pengelolaan arsip pemerintah secara baku serta Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku semula 22,05 menjadi 23,53.

3.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional

3.1.4.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja Level Provinsi / Nasional Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA 2025
				KAB. PAS	PROV. JAWA TIMUR	NASIONAL	
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	60,52	60,52	87,67	70,78
	Sasaran: Meningkatnya literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	Formulasi asi 2024 : 61,30 Formulasi asi 2025: 1,94	35,1	40	Formulasi 2024 : 480,78 Formulasi 2025 : 15,21
		2. Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,50	4,18	3,33	100
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Nilai audit kearsipan	Nilai	76,54	97,51	87,67	96,88

Sasaran : Meningkatnya pengawasan kearsipan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku	Persen	32,35	72	78	146,71
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81,10	91,83	73,61	100,12

Realisasi kinerja urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional adalah Tingkat Kegemaran Membaca Membaca (TGM), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Nilai audit kearsipan dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan target Persentase pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional karena tidak ada target nasional yang terkait langsung dengan indikator tersebut.

Realisasi Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Pasuruan sebesar 60,52, Tingkat kegemaran membaca masyarakat Provinsi Jawa Timur sebesar 60,52 dan Tingkat kegemaran membaca masyarakat secara Nasional sebesar 87,67. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Pasuruan masih perlu ditingkatkan dengan adanya regulasi dan inovasi.

Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasuruan formulasi 2024 sebesar 61,30, untuk formulasi 2025 sebesar 1,94. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Timur sebesar 35,1 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nasional sebesar 40. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan.

Realisasi Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Kabupaten Pasuruan sebesar 12,5%, tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 4,18% dan nasional sebesar 3,33%. Hal ini menunjukkan bahwa

Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Kabupaten Pasuruan sudah tinggi namun masih banyak desa-desa yang perlu dibangun membentuk replikasi pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Realisasi nilai audit kearsipan Kabupaten Pasuruan sebesar 76,54, tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 97,51 dan nasional sebesar 87,67. Hal ini menunjukkan bahwa nilai audit kearsipan Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan aspek-aspek penilaian

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar 81,10, tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 91,83 dan nasional sebesar 73,61. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan aspek-aspek penilaian

3.1.4.2 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja Level Provinsi / Nasional Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025			REALISASI CAPAIAN KINERJA 2025
				KAB. PAS	PROV. JAWA TIMUR	NASIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	60,52	60,52	87,67	81,23
		Nila Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	76,54	97,51	87,67	96,88
	Meningkatnya literasi masyarakat dan pengembangan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	Formulasi 2024 : 61,30	35,1	40	Formulasi 2024 : 101 Formulasi 2025 : 3,19

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

	perpustakaan inklusi sosial			Formulasi 2025: 1,94			
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,50	4,18	3,33	100
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Nilai audit kearsipan	Nilai	76,54	97,51	87,67	96,88
	Meningkatnya pengawasan kearsipan perangkat daerah	Persentase perangkat pengelolaan arsip Pemerintah Daerah secara baku	Persen	32,35	72	78	146,71
		Persentase Pengelolaan daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku	Persen	32,35	72	78	137,48
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81,10	91,83	73,61	100,12

Realisasi kinerja urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional adalah Tingkat Kegemaran Membaca Membaca (TGM), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Nilai audit kearsipan dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan target Persentase pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional karena tidak ada target nasional yang terkait langsung dengan indikator tersebut.

Realisasi Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Pasuruan sebesar 60,52, Tingkat kegemaran membaca masyarakat Provinsi Jawa Timur sebesar 60,52 dan Tingkat kegemaran membaca masyarakat secara Nasional sebesar 87,67. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Pasuruan masih perlu ditingkatkan dengan adanya regulasi dan inovasi.

Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasuruan formulasi 2024 sebesar 61,30, untuk formulasi 2025 sebesar 1,94. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Timur sebesar 35,1 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nasional sebesar 40. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan.

Realisasi Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Kabupaten Pasuruan sebesar 12,5%, tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 4,18% dan nasional sebesar 3,33%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Kabupaten Pasuruan sudah tinggi namun masih banyak desa-desa yang perlu dibangun membentuk replikasi pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Realisasi nilai audit kearsipan Kabupaten Pasuruan sebesar 76,54, tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 97,51 dan nasional sebesar 87,67. Hal ini menunjukkan bahwa nilai audit kearsipan Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan aspek-aspek penilaian

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar 81,10, tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 91,83 dan nasional sebesar 73,61. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan aspek-aspek penilaian

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

3.1.5.1 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.13
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	85,5	60,52	70,78
	Sasaran : Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	12,75	Formulasi 2024: 61,3 Formulasi 2025 : 1,94	Formulasi 2024 : 480,78 Formulasi 2025 : 15,21
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,5	12,5	100
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79	76,54	96,88
	Sasaran : Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	22,05	32,35	146,71
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81	81,10	100,12

3.1.5.2 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.14
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	74,5	60,52	81,23
		Nilai Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	79,00	76,54	96,88
	Sasaran : Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	60,69	Formulasi 2024: 61,3 Formulasi 2025 : 1,94	Formulasi 2024 : 101 Formulasi 2025 : 3,19
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,50	12,50	100
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79,00	76,54	96,88
	Sasaran : Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	1. Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	22,05	32,35	146,71
		2. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	23,53	32,35	137,48
	Sasaran : Meningkatnya	Nilai Akuntabilitas	Nilai	81,00	81,10	100,12

	Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kinerja Instansi Pemerintah				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

1) Faktor Penyebab Keberhasilan Kinerja

- Adanya komitmen pimpinan dengan seluruh staf dalam melaksanakan akuntabilitas dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dalam memenuhi indikator tujuan dan sasaran strategis;
- Kerja Sama yang baik antar bidang dengan tim perencanaan dan anggaran, struktur organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Program yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 sudah sangat mendukung dalam tingkat pencapaian kinerja tahun ini mungkin di tahun yang akan datang perlu sedikit di tambahkan beberapa sub kegiatan untuk lebih mendukung ketercapaian kinerja agar lebih maksimal;
- Telah tersedianya sistem informasi publik, partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
- Semangat dan inovasi dari seluruh pegawai dari level pimpinan sampai dengan staf dalam menerapkan serta mengembangkan program-program baru yang telah diberikan Perpustakaan dan ANRI baik melalui pelatihan maupun bimtek.

2) Faktor Penyebab Kegagalan Kinerja

- Minimnya sumber daya tenaga ahli fungsional terampil baik dari bidang perpustakaan maupun kearsipan, dan tenaga administrasi perkantoran;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung/penunjang baik untuk layanan perpustakaan maupun kearsipan;
- Kurangnya perpustakaan yang memenuhi standart minimal dan berakreditasi A.
- Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai audit sistem kearsipan eksternal (aske) ada beberapa permasalahan yaitu :

- a. Belum optimal dalam penggunaan sistem informasi klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. Tempat penyimpanan dan pengelolaan arsip tidak sesuai dengan standar ketetapan Depo Arsip/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan belum memiliki Depo Arsip;
- c. Penyerah Arsip statis dari PD ke lkpdp belum dilaksanakan karena masih kurang tenaga arsiparis bukan hasil penyetaraan jabatan struktural ke fungsional untuk mengelolah arsip statis;
- d. Belum optimal dalam pengelolaan arsip statis karena tidak memiliki Arsiparis Bukan hasil penyetaraan jabatan struktural ke fungsional;
- e. Masih banyak PD belum pernah melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan.

3) Solusi/Strategi Yang Akan Dilaksanakan

- Melakukan rekrutmen tenaga fungsional sesuai dengan pendidikan linier yang dibutuhkan baik arsiparis murni maupun pustakawan ;
- Perlunya penambahan anggaran APBD yang digelontorkan oleh Pemda ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan terutama untuk pemenuhan sarana dan prasarana baik untuk bidang perpustakaan maupun kearsipan;
- Mengoptimalkan layanan perpustakaan baik Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling, mengembangkan desa literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- Melakukan pembinaan, pelatihan dan monitoring secara insentif dan berkelanjutan bagi petugas pengelola perpustakaan dan perpustakaan desa/kelurahan/TBM sehingga dapat meningkatkan jumlah perpustakaan yang memenuhi standart minimal dan berakreditasi A;
- Membuka program perlindungan dan penyelamatan arsip, kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun dengan sub kegiatan penilaian

penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun;

- Pembangunan Depo Arsip yang sesuai Perka ANRI No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip;
- Melakukan pembinaan untuk tentang pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

Alokasi anggaran yang ditetapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 sebesar Rp 8.216.500.980,- (delapan milyar dua ratus enam belas juta lima ratus ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya baik kinerja maupun anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi (9=5/8 sd100)	KET.
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Meningkatkan kegiatan membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	74,5	60,52	81,23	1.615.229.350	1.226.708.630	75,95	93,49	Cukup efisien
	Nilai Audit Kearsipan/ Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKES)	79	76,54	96,88	345.816.000	225.192.920	65,12	142,21	Sangat efisien
Sasaran : Meningkatkan literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (PLM)	60,69	Formulasi 2024 : 61,3	Formulasi 2024 : 101	918.152.850	755.432.730	82,27	Formulasi 2024 : 122,27	2024 : Sangat efisien
			Formulasi 2025 : 1,94	Formulasi 2025 : 3,19				Formulasi 2025 : 3,87	2025: Tidak efisien
	Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berkas Inklusi Sosial (TPBS)	12,5	12,5	100	1.989.314.900	1.546.060.335	77,72	129,66	Sangat efisien
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip	Nilai audit kearsipan	79	76,54	96,88	345.816.000	225.192.920	65,12	148,77	Sangat efisien
	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	22,05	32,35	146,71	91.686.000	86.271.250	94,09	155,92	Sangat efisien
	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku	23,53	32,35	137,48	345.816.000	225.192.920	65,12	211,11	Sangat efisien
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81	81,1	100,12	5.849.982.844	4.751.525.000	81,22	123,27	Sangat efisien

Dari tabel diatas, terkait analisis terhadap efisiensi sumber daya pada setiap indikator kinerja baik tujuan maupun sasaran strategis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Indikator kinerja utama tujuan I : Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), pada awal tahun 2025 target kinerja ditetapkan 74,5 dan terealisasi hanya 60,52 sehingga prosentase capaian diperoleh sebesar 81,23%. Sedangkan pada alokasi anggaran TGM memiliki pagu awal Rp 1.615.229.350,- dan pada akhir periode 2025 hanya terealisasi sebesar Rp 1.226.708.630,- atau sekitar 75,95%. Dari perbandingan capaian kinerja dengan capaian anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 93,49% atau bisa dikategorikan “cukup efisien”;
- Indikator kinerja I dari sasaran strategis I : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), capaian kinerja IPLM tahun 2025 dengan formulasi 2024 sebesar 101%, dan dengan formulasi 2025 sebesar 3,19% dan persentase capaian anggaran sebesar 82,27% sehingga diperoleh tingkat efisiensi pada formulasi 2024 sebesar 122,27% atau bisa dikategorikan “sangat efisien” namun pada formulasi 2025 hanya sebesar 3,87% atau bisa dikategorikan “tidak efisien”
- Indikator kinerja II dari sasaran strategis I : Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 77,72% sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 128,66% atau bisa dikategorikan “sangat efisien”;
- Indikator kinerja dari tujuan ke II ini adalah nilai audit kearsipan yaitu berupa hasil audit eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), ada awal tahun 2025 target kinerja ditetapkan 79 dan terealisasi sebesar 76,54 sehingga prosentase capaian diperoleh sebesar 96,88% dengan capaian anggaran 77,72 sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 128,66 atau bisa dikategorikan “sangat efisien”;
- Indikator kinerja sasaran strategis yaitu persentase pengelolaan arsip pemerintah daerah secara baku, capaian kinerja pada indikator sasaran ini diperoleh sebesar 146,71% dan persentase penyerapan anggaran

sebesar 94,09% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 155,92% atau bisa dikategorikan "sangat efisien";

- Indikator kinerja sasaran strategis yaitu persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku, capaian kinerja pada indikator sasaran ini diperoleh sebesar 137,48% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 65,12% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 211,11% atau bisa dikategorikan "sangat efisien";
- Indikator kinerja sasaran strategis yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja diperoleh sebesar 100,12% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 81,22% sehingga diperoleh tingkat efesiensi sebesar 123,27% atau bisa dikategorikan "sangat efisien".

Commented [H1]: Perbaiki kata nya "sangat efisien"

3.1.7 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui layanan yang ada di perpustakaan;
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada pemustaka dalam berbagai layanan yang ada di perpustakaan;
3. Mulai menyiapkan data sebagai komponen akreditasi yang harus dipenuhi (data 3 tahun terakhir) dan mengusulkan anggaran pemenuhan sarana prasarana perpustakaan untuk tahun anggaran 2025;
4. Mengusulkan anggaran untuk program kegiatan Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) guna mewujudkan Literasi untuk Kesejahteraan;
5. Memberikan motivasi kepada Perangkat Daerah dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyusun regulasi terkait pengelolaan kearsipan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan;

7. Melaksanakan pendampingan pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah sehingga dapat meningkatkan nilai pengawasan kearsipan internal maupun eksternal yang menjadi poin penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Optimalisasi layanan dan pengelolaan informasi kearsipan berbasis IT (e-arsip) melalui percepatan implementasi aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yaitu Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Tabel 3.16

**CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PASURUAN 2025**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET (DPA)	REALISASI	CAPAIAN (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
A	Program Pembinaan Perpustakaan	1.989.314.900	1.546.060.335	77,72
1	PENGLOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.085.550,00	319.351.705	85,37
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	39.745.500	35.613.040	89,6
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.096.500	53.378.645	93,49
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	18.510.000	18.080.580	97,68
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	36.660.000	32.337.380	88,21

Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) Oleh Masyarakat	0	0	0
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.947.000	96.022.875	0
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	29.210.000	28.779.580	98,53
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	71.256.550	34.353.500	48,21
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	22.660.000	20.786.105	91,73
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0	0	0
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.615.229.350	1.226.708.630	75,95
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.972.500	43.766.850	97,32
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	650.416.000	421.861.090	64,86
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Temepat - tempat Umum Yag Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	41.433.500	41.261.000	99,58
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	878.407.350	719.819.690	81,95
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	19.010.000	17.730.030	93,27
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	19.010.000	17.730.030	93,27
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	19.010.000	17.730.030	93,27
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0	0	0

	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0	0	0
	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
A	Program Pengelolaan Arsip	345.816.000	225.192.920	65,12
	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.686.000	86.271.250	94,09
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	0	0	0
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	81.595.000	77.199.500,00	94,61
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10.091.000	9.071.750,00	89,9
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	0	0	0
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0
	Pemilihan Arsiparis Teladan	0	0	0
	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	0	0	0
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
	Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH	47.000.000	46.477.500	98,89
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	47.000.000	46.477.500	98,89
	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	207.130.000	92.444.170	44,63

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	207.130.000	92.444.170	44,63
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	11.990.000	10.989.000	91,65
PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DIBAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	0	0	0
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	0	0	0
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0	0	0
PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	11.990.000	10.989.000	91,65
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	11.990.000	10.989.000	91,65
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	0	0	0
PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	0	0	0
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	0	0	0
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	0	0	0

AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	0	0	0
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0	0	0
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0	0	0
PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG	0	0	0
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	0	0
Evaluasi dan Identifikasi Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	0	0	0
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	0	0
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	0	0	0
Persyaratan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	0	0
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	0	0
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.849.982.844	4.751.525.000	81,22
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	63.150.000	49.710.000	78,72
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.565.000	4.460.000	26,92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.585.000	45.250.000	97,13
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.896.079.388	3.973.942.287	81,17
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	4.178.485.888	3.345.103.137	80,06

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	717.593.500	628.839.150	87,63
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	260.978.980	211.640.623	81,09
Penyediaan Komponen Instalasi	11.404.000	11.321.500,00	99,28
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.424.480	12.659.251	68,71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.834.800	39.370.829	91,91
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.707.200	15.707.135	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.200.000	29.874.000	66,09
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.950.000	1.320.000	26,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.458.500	101.387.908	82,79
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	68.122.000	65.386.000	95,98
Pengadaan Mebel	19.030.000	18.204.000	95,66
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.092.000	47.182.000	96,11
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	294.024.876	190.506.130	64,79
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.024.876	190.506.130	64,79
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	267.627.600	260.339.960	97,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228.923.600	221.839.960	96,91

	Pemeliharaan Mebel	0	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.704.000	38.500.000	99,47
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
Total Anggaran		8.216.113.744	6.551.497.285	79,74

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pasuruan DPA Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 8.216.113.744,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.551.497.285,- dengan serapan dana APBD mencapai 79,74% terbagi menjadi 3 bidang. Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan dan Bidang Sekretariat. Anggaran Bidang Perpustakaan sebesar Rp 2.008.324.900 dengan realisasi Rp 1.563.790.365 dengan persentase 77,87%. Anggaran Bidang Kearsipan sebesar Rp.357.806.000,- dengan realisasi sebesar Rp.236.181.920,- dengan persentase 66,01%. Anggaran Sekretariat sebesar Rp. 5.849.982.844,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.751.525.000 dengan persentase sebesar 81,22%

Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Pembinaan Perpustakaan nilai anggaran sebesar Rp. 1.989.314.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.546.060.335,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 77,72%.
1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota nilai anggaran sebesar Rp.374.085.550,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 319.351.705,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 85,37%. Kegiatan ini menggunakan sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,

Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota nilai anggaran sebesar Rp 1.615.229.350,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.226708.630,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 75,95% dengan sub kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

B. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno nilai anggaran sebesar Rp.19.010.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.730.030,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,27%. Melalui Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Pengelolaan Arsip nilai anggaran sebesar Rp. 345.816.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 225.192.920,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 65,12%.

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota nilai anggaran sebesar Rp 91.686.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.271.250,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,09%. Kegiatan ini hanya mengambil sub kegiatan :

- 1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis nilai anggaran sebesar Rp 81.595.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.199.500,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,61%

- 1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota nilai anggaran sebesar Rp 10.091.000,- dan

realisasi anggaran sebesar Rp. 9.071.750,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,90%

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota nilai anggaran sebesar Rp 47.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.477.500,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,89%. Kegiatan ini hanya mengambil sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota nilai anggaran sebesar Rp 207.130.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.444.170,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 44,63%, kegiatan ini hanya mengambil Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN

D. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip nilai anggaran sebesar Rp. 11.990.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.989.000,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,65%. Program ini hanya memiliki Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana dengan nilai anggaran sebesar Rp. 11.990.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.989.000,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,65%.

E. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah nilai anggaran sebesar Rp. 8.849.982.844,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.751.525.000,- dengan persentase penyerapan anggaran 81,22%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah nilai anggaran sebesar Rp. 63.150.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.710.000,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 78,72% dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.896.079.388,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.973.942.287,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar

81,17%, terdiri dari sub kegiatan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah nilai anggaran sebesar Rp. 260.978.980,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 211.640.623,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 81,09% dengan Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah nilai anggaran sebesar Rp. 68.122.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.386.000,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,98%, kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Pengadaan Mebel serta Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik nilai anggaran sebesar Rp.294.024.876,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 190.506.130,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 64,79%
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah nilai anggaran sebesar Rp. 267.627.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 260.339.960,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,28% dengan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serta Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatkan literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial. Ini merupakan pengampu urusan bidang perpustakaan, sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TBIS). Kedua indikator ini sama-sama tertuang dalam program pembinaan perpustakaan, kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten/kota namun disub kegiatan yang berbeda. Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) memiliki anggaran sebesar Rp 39.745.500,- dengan realisasi anggaran Rp 35.613.040,- atau capaian sebesar 89,60% dengan sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat dengan anggaran Rp. 878.407.350,- dengan realisasi anggaran Rp. 719.819.690,- atau capaian sebesar 81,95%. Sedangkan indikator Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TBIS) hanya menggunakan anggaran dari sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebesar Rp 650.416.000,- dengan realisasi anggaran Rp 421.861.090,- atau 64,86%.
2. Meningkatkan pengawasan kearsipan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja persentasae Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku. Sasaran ini diampu oleh bidang kearsipan dengan anggaran Rp 10.091.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.071.750,- atau tingkat capaian 89,90%. Indikator ini mengampu program pengelolaan arsip dengan kegiatan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator ini dilaksanakan oleh sekretariat dengan program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 5.849.982.844,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.751.525.000,- atau tingkat capaian 81,22%.

Tabel 3.13 merupakan rincian terkait alokasi anggaran per sasaran pembangunan 2025 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Sasaran : Meningkatkan literasi masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi social	650.416.000	421.861.090	64,86
	Indikator 1 : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	918.152.850	755.432.730	82,27
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.989.314.900	1.546.060.335	77,72
	Kegiatan 1: Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	374.085.550,00	319.351.705	85,37
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	39.745.500	35.613.040,00	89,6
	Kegiatan 2: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.615.229.350	1.226.708.630	75,95

	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	878.407.350	719.819.690	81,95
	Indikator 2 : Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TBIS)	1.989.314.900	1.546.060.335	77,72
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.989.314.900	1.546.060.335	77,72
	Kegiatan 2: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.615.229.350	1.226.708.630	75,95
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	650.416.000	421.861.090	64,86
2	Sasaran : Meningkatkan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	345.816.000	225.192.920	65,12
	Indikator : Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Kearsipan Secara Baku	345.816.000	225.192.920	65,12
	Program Pengelolaan Arsip	345.816.000	225.192.920	65,12
	Kegiatan 1: Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	91.686.000	86.271.250	94,09
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	81.595.000	77.199.500,00	94,61
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.091.000	9.071.750,00	89,9
	Kegiatan 2: Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000	46.477.500	98,89

	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	47.000.000	46.477.500	98,89
	Kegiatan 3: Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	207.130.000	92.444.170	44,63
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	207.130.000	92.444.170	44,63
3	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.849.982.844	4.751.525.000	81,22
	Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5.849.982.844	4.751.525.000	81,22
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.849.982.844	4.751.525.000	81,22
	Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.150.000	49.710.000	78,72
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.565.000	4.460.000	26,92
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.585.000	45.250.000	97,13
	Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.896.079.388	3.973.942.287	81,17
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	4.178.485.888	3.345.103.137	80,06
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	717.593.500	628.839.150	87,63

	Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.978.980	211.640.623	81,09
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.404.000	11.321.500,00	99,28
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.424.480	12.659.251	68,71
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.834.800	39.370.829	91,91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.707.200	15.707.135	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.200.000	29.874.000	66,09
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.950.000	1.320.000	26,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.458.500	101.387.908	82,79
	Kegiatan 4: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.122.000	65.386.000	95,98
	Pengadaan Mebel	19.030.000	18.204.000	95,66
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.092.000	47.182.000	96,11
	Kegiatan 5: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.024.876	190.506.130	64,79
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.024.876	190.506.130	64,79

	Kegiatan 6: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.627.600	260.339.960	97,28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228.923.600	221.839.960	96,91
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.704.000	38.500.000	99,47

BAB IV PENUTUP

Secara garis besar dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat pencapaian sasaran secara umum pada Tahun 2025 dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis yaitu Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) sebesar 60,52%, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 61,3%, Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebesar 12,5%, Nilai Audit Kearsipan sebesar 76,54%, Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baku sebesar 32,35% dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 81,10%.

Adapun rencana strategis kedepan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya meningkatkan kegiatan literasi dengan berkoordinasi aktif dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, lembaga, organisasi, masyarakat dan pihak swasta untuk berkerjasama dalam berbagai even literasi, sedangkan untuk urusan pengelolaan kearsipan akan melakukan kerjasama serta meningkatkan peran masyarakat dalam pencarian, pengelolaan dan penyimpanan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Semoga dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja pada Tahun 2025 dan agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Pasuruan, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN



JAU KHUL GHONY, S.E, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197002111993031006

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIANO VELA FERY S, S.Sos., M.A

Jabatan : Pjt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. Bupati Pasuruan

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

Pasuruan, 2 Januari 2025

Pjt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pasuruan

DIANO VELA FERY S, S.Sos., M.A

Pembina Utama Muda
NIP. 197311161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN

No.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	85,5
	1 Meningkatkan Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	12,75
		2 Prosentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,50
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79,00
	1 Meningkatkan Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	1 Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	22,05
	2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81,00

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 2.899.378.650	APBD
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 61.910.000	APBD
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp 386.853.500	APBD
4	Program Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 113.076.500	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.874.347.519	APBD

Pj. Bupati Pasuruan



Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

Pasuruan, 2 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pasuruan



DIANO VELAFERY S. S.Sos., M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 197311161992031001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIKHUL GHONY, S.E., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO
Jabatan : BUPATI PASURUAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 15 September 2025

Bupati Pasuruan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pasuruan

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TAUFIKHUL GHONY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197002111993031006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN**

No.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	74,50
		Nilai Audit Kearsipan/Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	79,00
	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	60,69
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	Persen	12,50
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79,00
	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Secara Baku	Persen	22,05
		Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	23,53
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	81,00

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1,989,314,900	P-APBD
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 19,010,000	P-APBD
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp 345,816,000	P-APBD

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
4	Program Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 11,990,000	P-APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,849,982,844	P-APBD

Bupati Pasuruan



H.MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Pasuruan, 15 September 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pasuruan



TAUFIKHUL GHONY, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197002111993031006



**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

NOMOR : x.700.1.2.1/I.X.AKIP-02/424.060/2025
TANGGAL : 02 OKTOBER 2025

	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN INSPEKTORAT DAERAH Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM 9 Bangil, Pasuruan Website : www.inspektorat.pasuruankab.go.id e-mail : inspektorat.kab.pas@gmail.com
LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025	
Nomor : x.700.1.2.1/LX.AKIP-02/424.060/2025 Tanggal : 2 Oktober 2025 Lampiran : - Satuan Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
I. Pendahuluan A. Dasar Hukum Evaluasi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. 6. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. B. Latar Belakang Evaluasi Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.	

C. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metode Evaluasi AKIP

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

- F. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan adalah unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan dan Bidang kearsipan serta tugas pembantuan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk pelaksanaan tugas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:
- Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - Pelaksanaan kebijakan dibidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan dan;
 - Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja)
Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 80,50 dengan kategori A (Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang	Menyusun target dalam perencanaan kinerja yang menantang yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Strategis 2025
2.	Lebih optimal dalam melakukan pemantauan terhadap penerapan rencana aksi dan aktivitasnya	Mengoptimalkan pemantauan terhadap penerapan rencana aksi dan aktivitas melalui monitoring dan evaluasi
3.	Menyesuaikan rencana aksi dan aktivitas kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja	Menyusun rencana aksi dan aktivitas kinerja yang selaras untuk pencapaian kinerja

II. Gambaran Hasil Evaluasi

A. Kelemahan Dalam Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori Peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
			baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Inspektorat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024	Tahun 2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	23,70
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,60	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,55	11,55
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25	21,25
			80,50	81,10

(Dalam poin a s/d d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal – hal substantif yang telah diwujudkan

dan dilakukan secara konsisten dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sebagian belum dicapai dengan baik. Capaian Kinerja pada sebagian indikator kinerja utama yang tidak tercapai sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	85	74,33	87,45%

b. Berdasarkan uji petik, rincian belanja dengan target kinerja belum sepenuhnya sesuai sehingga keterikatan antara perencanaan anggaran dan capaian kinerja belum sepenuhnya konsisten.

Uraian	DPA 2025		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Rincian Belanja
1	2	3	4
Program Pembinaan Perpustakaan			
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya		
Indikator Keluaran	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	3 Orang

c. Hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja. Hal ini dikarenakan catatan pada hasil evaluasi tahun 2024, yaitu perencanaan kinerja yang belum tercapai dengan baik, kembali terulang pada tahun 2025.

B. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan agar dapat melakukan beberapa langkah – langkah perbaikan sebagai berikut:

- Menyesuaikan rencana aksi dan aktivitas kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja.
- Menyelaraskan perencanaan anggaran dengan target kinerja sehingga penggunaan sumber daya lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian kinerja organisasi.

- c. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

III. Penutup

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 81,10 dengan kategori A (Memuaskan), yang memberikan gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun – tahun selanjutnya lebih baik dan terarah.



RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720103 199201 1 002